

AKUNTANSI UNTUK SEMUA: LITERASI DIGITAL SEBAGAI ALAT INKLUSI KEUANGAN DAN KEADILAN SOSIAL

Anggya Pratnya Paramitha¹

anggya_pratnya@students.unnes.ac.id

¹Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang

Bintang Sabrina Lumban Raja²

bintangsbbrn07@students.unnes.ac.id

²Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang

Laudia Triska Dewi³

laudiadewi@students.unnes.ac.id

³Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang

Putri Amalia Widyaningtias⁴

amaliaputriw16@students.unnes.ac.id

⁴Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Di era digital kesenjangan akses terhadap pencatatan keuangan sederhana masih kerap menghambat terwujudnya keadilan sosial. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui peran literasi digital dalam rangka mendorong inklusi khususnya bidang keuangan dan keadilan sosial bagi setiap lapisan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang didistribusikan melalui angket kepada masyarakat serta data dianalisis menggunakan Microsoft Excel. Penelitian ini mengenali pola hubungan kemampuan literasi digital dengan akses keuangan digital kelompok marjinal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi digital yang rendah khususnya pada penggunaan aplikasi keuangan menyebabkan lemahnya pencatatan keuangan dan kurangnya penggunaan dompet digital/produk perbankan. Sebaliknya, adanya pelatihan digitalisasi bersama komunitas dan pendampingan praktik akuntansi sederhana dengan platform keuangan digital terbukti meningkatkan partisipasi ekonomi dan menekan ketimpangan akses keuangan. Akuntansi sederhana dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas keputusan masyarakat. Literasi digital mempercepat adopsi akuntansi sederhana dan perluasan akses kelompok marginal. Akses yang merata terhadap ketiga elemen tersebut akan mewujudkan keadilan sosial bagi semua. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu literasi digital bukan hanya keterampilan tetapi merupakan strategi dalam mewujudkan inklusi keuangan digital. Penelitian ini dapat menjadi fondasi bagi pemerintah untuk dapat melakukan pemerataan akses digitalisasi yang berguna bagi pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Inklusi keuangan, keadilan sosial, literasi digital, keuangan digital.

ABSTRACT

In the digital era, the gap in access to simple financial record-keeping still often hinders the realization of social justice. This study aims to determine the role of digital literacy in promoting inclusion, particularly in the fields of finance and social justice for all levels of society. This research uses a quantitative method distributed through questionnaires to people who have businesses, and the data is analyzed using Microsoft Excel. This research identifies the pattern of the relationship between digital literacy skills and access to digital finance among marginalized groups. The results of this study indicate that low digital literacy, particularly in the use of financial applications, leads to weak financial record-keeping and limited use of digital wallets/banking products. Conversely, the presence of digitalization training with communities and guidance in simple accounting practices using digital financial platforms has been proven to increase economic participation and reduce disparities in financial access. Simple accounting can improve accountability and the quality of community decisions. Digital literacy accelerates the adoption of simple accounting and the expansion of access for marginalized groups. Equitable access to these three elements will realize social justice for all. The conclusion of this study is that digital literacy is not merely a skill but a strategy in realizing digital financial inclusion. This research can serve as a foundation for the government to be able to implement equitable access to digitalization that is beneficial for economic growth.

Keywords: Inclusion financial, social justice, financial literacy, digital finance.

PENDAHULUAN

Sejak 2008 inklusi keuangan menjadi tren yang mendasari dampak krisis oleh kelompok marjinal yang secara umum tidak menggunakan akses keuangan digital. Pada Toronto Summit 2010, dikeluarkan 9 prinsip untuk meningkatkan akses keuangan bagi kelompok marjinal yaitu, *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality, dan framework*. Literasi digital merupakan penerapan prinsip *knowledge* sebagai alat pengetahuan mengenai keuangan digital menuju inklusi keuangan (Bank Indonesia, 2020).

Pengeluaran kecil, seperti biaya parkir, fotokopi, dan pembelian kecil lainnya seringkali tidak dicatat serta dianggap sepele. Padahal jika ditotal pada akhir bulan, jumlahnya bisa cukup besar dan dapat mengkhawatirkan ketahanan hidup bagi seseorang yang tidak mempunyai dana cadangan. Sistem keuangan digital biasanya memiliki fitur mencatat setiap mutasi sekecil apa pun yang keluar dan masuk, sehingga setiap pengeluaran kecil yang dianggap sepele dapat tercatat otomatis. Ketika dompet fisik hilang, terdapat kemungkinan uang di dalamnya ikut lenyap. Berbeda dengan *m-banking* atau *e-wallet*, ketika HP hilang atau rusak, uang tetap aman dalam sistem bank karena dilindungi oleh PIN, dan dapat diakses kembali melalui *device* lain atau diurus ke bank. Ketika pada level individu kendali terhadap keuangan yang tidak optimal dapat merusak siklus hidup bulanan, bagaimana jika hal tersebut terjadi kepada seseorang yang menjadi tulang punggung keluarga.

UMKM memiliki masalah klasik berupa bercampurnya uang dagang dengan uang non-dagang. Hal tersebut sering menyebabkan kebingungan hingga kebangkrutan usaha, sebab uang yang seharusnya digunakan untuk memutar modal usaha menjadi tidak ada. Rekening digital yang terpisah memberi sekat kepada pelaku usaha untuk disiplin dalam mengelola uang. Selain itu, ketika terjadi musibah, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, uang tunai yang disimpan secara fisik dapat ikut musnah. Namun, ketika uang disimpan secara digital, modal usaha akan tetap utuh dan dapat dipulihkan.

Sebenarnya tantangan terbesar dari inklusi keuangan bukan hanya mereka yang berada dalam ranah bisnis, tetapi masyarakat kelompok marginal. Transaksi sehari-hari, seperti membayar listrik dan air memerlukan biaya lain berupa ongkos untuk menuju tempat pembayaran. Bahkan dalam pembagian bantuan sosial berupa uang, mereka harus mengeluarkan biaya transportasi dan meluangkan waktu untuk mengambil uang tersebut. Estimasi waktu perjalanan dan mengantre dapat memangkas waktu kerja mereka. Bagi para pekerja harian, ketika waktu kerja berkurang, maka pendapatan pada hari itu akan ikut berkurang. Uang mereka habis untuk urusan administrasi, bukan konsumsi sehari-hari. Eksklusi keuangan digital secara nyata menyebabkan kemiskinan yang sistematis.

Literasi digital merupakan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi dan informasi yang ada dengan efektif dan efisien di berbagai kehidupan sehari-hari serta pengaturannya (Supriati, 2020). Inklusi keuangan merupakan tersedianya akses di berbagai layanan jasa keuangan, lembaga, dan produk yang sesuai kebutuhan serta kemampuan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan seluruh elemen masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2025). SNLK OJK Tahun 2025 melalui metode keberlanjutan menunjukkan bahwa indeks inklusi keuangan sebesar 80.51%. Segmen masyarakat yang memiliki indeks inklusi keuangan yang lebih tinggi dibanding dengan kelompok lain, berdasarkan klasifikasi desa, penduduk di perkotaan. Berdasarkan gender, laki-laki dapat dikatakan sebanding dengan perempuan. Berdasarkan usia, kelompok 36-50 yang paling tinggi. Berdasarkan tingkat pendidikannya, penduduk lulusan SMA/Sederajat dan Perguruan Tinggi Negeri. Berdasarkan pekerjaannya yang memiliki indeks tertinggi adalah pegawai, purnawirawan, dan wiraswasta (Otoritas Jasa Keuangan, 2025).

Fitri (2024) menjelaskan bahwa literasi digital, literasi keuangan, dan *financial technology* saling berkaitan dan berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Temuan ini selinear dengan penelitian Joseph et. al., (2021), Liska et. al., (2022), dan Ainiyah & Yuliana (2022) yang menemukan pengaruh positif literasi keuangan terhadap inklusi keuangan serta Laut & Hutajulu (2019) dan Mardiana et. al., (2020) memaparkan hal yang sama untuk *fianncial technology*. Berbeda dengan temuan sebelumnya, Yoga & Handayani (2020) justru menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berpengaruh serta Sari & Kautsar (2020) juga menyatalan *financial technology* tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan. Ditemukannya inkonsistensi dalam riset, maka perlu dilakukan penelitian kembali

Eksklusi keuangan akan menimbulkan berbagai kompleksitas permasalahan di atas, yaitu risiko uang tunai hilang, bias antara sekat modal usaha dengan uang pribadi, serta biaya transaksi fisik yang dapat mencekik kelompok marginal. Masalah tersebut memerlukan integrasi yang menyeluruh, bukan hanya secara parsial. Pertama, perlu ada pembenahan tata kelola keuangan bagi pelaku usaha secara aktif menerapkan akuntansi sederhana yang bersifat non-teknis. Di samping itu, perlu adanya penguatan literasi digital kepada masyarakat pedesaan yang mencakup aspek akses, keterampilan, dan keamanan data. Gerbang inklusi keuangan akan terbuka ketika masyarakat telah cakap secara digital dan disiplin dalam penggunaan akuntansi sederhana, serta kelompok *unbanked* dapat, mengakses layanan simpan pinjam dan asuransi secara aman. Integrasi antara sistem akuntansi yang tertib, kecakapan literasi digital, dan keberhasilan inklusi keuangan perbankan melahirakan suatu keadilan sosial dalam pemerataan distribusi sumber daya dan partisipasi ekonomi yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016, inklusi keuangan memiliki tujuan yaitu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dan produk jasa keuangan serta lembaganya, sehingga dapat menyediakan produk dan layanan jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat, meningkatkan penggunaan dan kualitas dalam pemanfaatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak literasi digital terhadap praktik akuntansi sederhana terhadap peningkatan akuntabilitas dan pengambilan keputusan keuangan pada UMKM serta masyarakat pedesaan. Selanjutnya, untuk mengetahui bagaimana inklusi keuangan dapat memperluas akses layanan kelompok *unbanked* melalui pelatihan literasi keuangan dan sistem akuntansi yang mendukung. Akhirnya, terdapat bukti antara dampak akses yang merata, literasi digital, dan inklusi keuangan terhadap perwujudan keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Akuntansi untuk Semua (Akuntansi Sederhana, Partisipatif, Non-Teknis)

Konsep “Akuntansi untuk Semua” yang mencakup akuntansi sederhana, partisipatif, dan non-teknis menekankan bahwa praktik akuntansi tidak harus rumit dan terbatas pada kalangan profesional, melainkan dapat diakses dan diterapkan oleh pelaku UMKM, aparat desa, maupun masyarakat umum dengan pendekatan yang disesuaikan. Yanti & Nurhidayah (2020) dalam penelitiannya pada UD Rian Arianto Farm menunjukkan bahwa akuntansi sederhana melalui pemahaman dasar elemen ALOE (Aset, Liabilitas, Ekuitas) serta penyusunan neraca dan laporan laba rugi sederhana mampu menjadi solusi bagi UMKM yang selama ini hanya mencatat transaksi kas tanpa laporan keuangan terstruktur, sehingga pemilik usaha dapat mengetahui kinerja keuangan dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Sementara itu, Kurniawan (2025) mengembangkan konsep akuntansi partisipatif dalam pengelolaan dana desa, di mana masyarakat terlibat aktif sejak perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pengawasan keuangan desa, yang terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kontrol sosial, serta pemberdayaan masyarakat, meskipun tantangan seperti rendahnya pemahaman akuntansi dan keterbatasan akses teknologi masih perlu diatasi melalui pelatihan berkelanjutan. Pendekatan non-teknis menjadi benang merah

dari kedua konsep tersebut, karena baik UMKM maupun aparat desa dan warga pada umumnya belum memiliki latar belakang akuntansi formal, sehingga diperlukan penyederhanaan prinsip akuntansi, penggunaan analogi mudah dipahami, serta pemanfaatan teknologi sederhana seperti aplikasi Siskeudes dan laporan keuangan, agar akuntansi tidak lagi dipandang sebagai hambatan melainkan sebagai alat pemberdayaan dan penguatan tata kelola keuangan yang inklusif.

P1: Penerapan akuntansi sederhana, partisipatif, dan non-teknis berdampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan keuangan pada UMKM.

Literasi Digital (Definisi, Dimensi: Akses, Keterampilan, Etika, Keamanan, Indikator)

Literasi digital didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan perangkat digital, alat komunikasi, dan jaringan untuk mengakses, mengevaluasi, membuat, serta menyebarkan informasi secara kritis, etis, dan bertanggung jawab (Suryadi, 2023). Dimensi utama literasi digital meliputi: (1) akses terhadap teknologi dan internet yang merata; (2) keterampilan teknis dalam mengoperasikan perangkat serta mencari dan memilah informasi; (3) etika digital (netiket), yakni kesadaran dalam berinteraksi, menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan menjaga privasi; serta (4) keamanan digital, yaitu perlindungan data pribadi, rekam jejak digital, dan kewaspadaan terhadap kejahatan siber (Isabella et. Al., 2023; Saputra, 2023). Indikator literasi digital mencakup pemanfaatan media digital untuk akses layanan publik, pemahaman terhadap UU ITE, frekuensi membaca bahan digital, serta partisipasi dalam kegiatan literasi digital (Suryadi, 2023). Dengan demikian, literasi digital tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menyangkut kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial.

P2: Literasi digital yang mencakup akses, keterampilan, etika, dan keamanan, berdampak positif terhadap adopsi praktik akuntansi sederhana di kalangan masyarakat pedesaan dan pelaku usaha mikro.

Inklusi Keuangan (Akses Tabungan, Kredit, Asuransi, Pembayaran Digital untuk Unbanked)

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai upaya untuk memastikan akses yang merata, terjangkau, dan berkualitas terhadap berbagai produk dan layanan jasa keuangan termasuk tabungan, kredit, asuransi, serta pembayaran digital bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok unbanked atau yang belum terjangkau sistem keuangan formal (Puspasari et al., 2020). Akses terhadap tabungan memungkinkan individu menyetor pendapatan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan, sementara akses kredit berperan penting dalam memenuhi kebutuhan modal produktif seperti yang dimanfaatkan petani jagung di Desa Jotang untuk pembiayaan musim tanam (Puspasari et al., 2020). Di sisi lain, layanan asuransi membantu mengurangi risiko keuangan, dan pembayaran digital terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kinerja UMKM karena mempermudah transaksi, mempercepat pencatatan keuangan, serta mengurangi risiko kehilangan uang tunai (Rani & Desiyanti, 2024). Namun, efektivitas inklusi keuangan sangat bergantung pada literasi keuangan masyarakat, karena tanpa pemahaman yang memadai, akses terhadap layanan keuangan tidak akan dimanfaatkan secara optimal (Safii & Nisa, 2024). Dengan demikian, untuk menjangkau unbanked, diperlukan sinergi antara perluasan akses, peningkatan kualitas layanan, serta edukasi keuangan yang berkelanjutan.

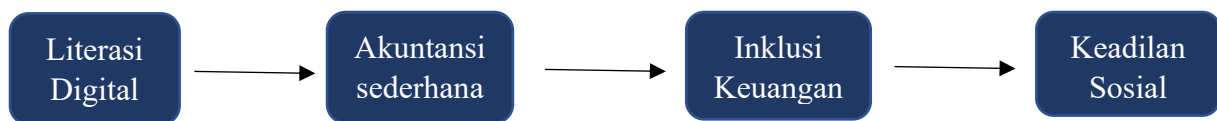
P3: Inklusi keuangan (akses tabungan, kredit, asuransi, dan pembayaran digital) berdampak positif terhadap perluasan akses layanan keuangan bagi kelompok unbanked, yang dimediasi oleh tingkat literasi keuangan dan didukung oleh sistem akuntansi yang tertib.

Keadilan Sosial (Distribusi Sumber Daya, Pengakuan, Partisipasi)

Dalam konteks ekonomi dan pembangunan, pelaku UMKM terutama yang berada di daerah tertinggal, perdesaan, atau sektor informal sering kali mengalami ketidakadilan distributif karena akses terbatas terhadap permodalan, teknologi, pelatihan, dan infrastruktur pasar, sementara kebijakan pembangunan yang mengutamakan efisiensi anggaran cenderung mengalokasikan sumber daya ke sektor atau wilayah yang lebih maju secara ekonomi (Rais et al., 2025). Dimensi pengakuan tercermin dari masih rendahnya apresiasi terhadap kontribusi UMKM dalam perekonomian nasional, serta marginalisasi pelaku UMKM perempuan, minoritas, atau komunitas adat dalam akses terhadap program-program pemerintah (Fraser, 2019); (Junin, 2024). Sementara itu, dimensi partisipasi menjadi kunci karena pelaku UMKM jarang dilibatkan secara aktif dalam perencanaan kebijakan pembangunan, seperti penyusunan anggaran daerah, program kemitraan, atau regulasi usaha mikro, sehingga kebijakan yang dihasilkan sering tidak responsif terhadap kebutuhan riil mereka (Amika et. al., 2024). Oleh karena itu, mewujudkan keadilan sosial bagi pelaku UMKM memerlukan redistribusi sumber daya yang lebih berpihak pada kelompok usaha marginal, pengakuan terhadap peran dan identitas mereka sebagai subjek pembangunan, serta partisipasi bermakna dalam setiap tahap pengambilan kebijakan ekonomi.

P4: Akses yang merata terhadap akuntansi sederhana, literasi digital, dan inklusi keuangan secara bersama-sama berdampak positif terhadap terwujudnya keadilan sosial dalam dimensi distribusi sumber daya, pengakuan, dan partisipasi bagi pelaku UMKM marginal.

Berdasarkan hipotesis di atas, kerangka konseptual atas studi ini bisa ditampilkan seperti dibawah ini:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Jenis studi yang dimanfaatkan ialah studi kuantitatif asosiatif. penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan rancangan yang terstruktur, sesuai dengan sistematika penelitian ilmiah (Rusydi et al., 2024) dan (Hemayanti & Nurabiah, 2025; Yuardi, Anggun, Lestari, & Nurabiah, 2023). Sementara itu, penelitian asosiatif dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, (2016), sebagaimana dikutip dalam Wulandari & Efendi, 2022). Lewat studi ini, sebuah teori dapat dikembangkan yang berfungsi guna memprediksi, menjelaskan, dan mengontrol sebuah kejadian.

Pada studi ini, populasi yang ditetapkan sebagai objek ialah masyarakat umum yang berdomisili di Kecamatan Gunungpati, Semarang dan telah menggunakan layanan keuangan digital seperti QRIS, dompet digital, atau *mobile banking*. Penghimpunan sampling menggunakan metode *non-probability sampling* melalui pendekatan *purposive sampling*, dengan kriteria seperti, berdomisili di Kecamatan Gunungpati, memiliki smartphone dan pernah menggunakan layanan keuangan digital, dan bersedia menjadi responden. Populasi target penelitian ini merupakan masyarakat yang tinggal diwilayah Kecamatan Gunungpati. Peneliti menjangkau populasi aksesibel, yaitu warga gunungpati yang aktif dalam grup WhatsApp domisili. Sumber data yang digunakan merupakan data primer, yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner secara online dengan media *Google Form*. Jumlah responden yang berhasil mengisi kuesioner secara lengkap adalah 55 orang, yang keseluruhannya ditetapkan sebagai sampel penelitian. Data dari responden akan di analisis menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Kuesioner dalam penelitian ini diambil dari sru di terdahulu

tentang literasi digital, inklusi keuangan, dan keadilan sosial. Skor yang digunakan adalah likret 1 sampai 4. Angka 1 berarti sangat tidak setuju, dan angka 4 berarti sangat setuju. Isi dari kuesioner digunakan untuk mengukur pengaruh literasi digital terhadap inklusi keuangan dan keadilan sosial dalam konsep “Akuntansi Untuk Semua” pada masyarakat umum Kecamatan Gunungpati.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini melibatkan 55 orang responden yang memenuhi kriteria *purposive sampling*, yakni berdomisili di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, serta telah menggunakan minimal satu layanan keuangan digital seperti QRIS, dompet digital, atau *mobile banking*. Keseluruhan responden (100%) menyatakan memiliki *smartphone* dan aktif menggunakannya, yang menjadi persyaratan utama dalam pemanfaatan layanan keuangan digital. Data karakteristik demografis responden disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Demografis Responden

Karakteristik	Kategori	Jumlah (n)	Persentase(%)
Usia	< 20 tahun	40	72,7
	20-30 tahun	8	14,5
	31-40 tahun	4	7,3
	> 50 tahun	3	5,5
Jenis Kelamin	Perempuan	40	72,7
	Laki-laki	15	27,3
Pekerjaan	Mahasiswa	44	80
	UMKM/Pedagang	6	10,9
	Lainnya	5	9,1
Pendapatan/Bulan	< Rp1.000.000	25	45,5
	Rp1.000.000-Rp2.000.000	20	36,4
	Rp2.000.000-Rp3.000.000	6	10,9
	> Rp3.000.000	4	7,3

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kelompok usia di bawah 20 tahun dengan persentase sebesar 72,7% dan didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 72,7%. Sebagian besar responden berstatus sebagai mahasiswa, yaitu sebanyak 80%, yang menunjukkan bahwa Kecamatan Gunungpati merupakan kawasan pendidikan dan lingkungan kampus. Dari sisi pendapatan, hampir separuh responden yaitu sebesar 45,5% memiliki penghasilan di bawah Rp1.000.000 per bulan, yang menggambarkan kondisi ekonomi yang umum dimiliki oleh kalangan pelajar dan mahasiswa.

Penelitian literasi digital ini diukur dari lima indikator, tiga di antaranya menggunakan skala likert 1–4 dan dua menggunakan pilihan Ya/Tidak/Mungkin yang dikonversi ke skor numerik. Hasil deskriptif dari masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Statistik Deskriptif Item Literasi Digital

No.	Indikator Literasi Digital	Rata-rata	Standar Deviasi	Kategori
1	Kemampuan mengoperasikan <i>smartphone</i>	3,78	0,50	Sangat Tinggi
2	Kemampuan membedakan berita hoaks keuangan	3,62	0,62	Sangat Tinggi
3	Kemampuan menggunakan aplikasi keuangan digital	3,56	0,86	Sangat Tinggi

4	Penggunaan kata sandi berbeda di tiap aplikasi	2,75	1,49	Cukup
5	Pernah mengikuti pelatihan/pendampingan digital	1,96	1,17	Rendah
	Skor Total Literasi Digital	15,67	2,92	Sedang–Tinggi

Berdasarkan Tabel 2, indikator kemampuan teknis, seperti mengoperasikan *smartphone*, menggunakan aplikasi keuangan, dan membedakan informasi hoaks, menunjukkan rata-rata yang sangat tinggi, yaitu berkisar antara 3,56–3,78 dari skor maksimum 4,00. Namun, masih terdapat kesenjangan pada aspek keamanan digital, khususnya dalam penggunaan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun dengan rata-rata sebesar 2,75, serta partisipasi dalam pelatihan digital yang memiliki rata-rata paling rendah, yaitu 1,96. Kondisi ini menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat Kecamatan Gunungpati lebih kuat pada dimensi penggunaan teknologi dibandingkan aspek keamanan digital dan pengembangan kompetensi secara formal. Secara keseluruhan, skor total literasi digital memiliki rata-rata sebesar 15,67 dari skor maksimum 20 dengan standar deviasi sebesar 2,92. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa tingkat literasi digital responden tergolong sedang hingga tinggi.

Fenomena kesenjangan antara tingginya kecakapan operasional teknologi (3,56–3,78) dengan rendahnya proteksi keamanan kata sandi (2,75) ini sejalan dengan temuan Ramadhan dan Purwandari (2023). Dalam studinya mengenai pengguna perbankan digital di Indonesia, mereka mengonfirmasi bahwa pertumbuhan adopsi layanan keuangan digital yang masif sering kali tidak dibersamai dengan tingkat kesadaran keamanan informasi (*information security awareness*) yang matang. Pengguna cenderung mahir secara praktis dalam memanfaatkan fitur aplikasi, namun tetap memiliki celah kerentanan yang tinggi terhadap risiko kejahatan digital akibat lemahnya perilaku proteksi data pribadi, seperti manajemen kata sandi dan PIN yang kurang ketat. Hal ini menegaskan bahwa penguatan literasi digital di masa depan tidak boleh hanya berfokus pada kemudahan aksesibilitas, melainkan harus mencakup edukasi proteksi siber secara mendalam.

Tingginya kemampuan responden dalam mengoperasikan *smartphone* dan menggunakan aplikasi keuangan digital menunjukkan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam mendukung penerapan akuntansi sederhana di tangan-tengah masyarakat. Kondisi ini juga mendukung hipotesis P2 yang menyatakan bahwa literasi digital yang mencakup akses, keterampilan, etika, dan keamanan digital berdampak positif terhadap adopsi praktik akuntansi sederhana. Melalui kemampuan penggunaan teknologi digital, masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan pencatatan pemasukan, pengeluaran, maupun transaksi keuangan secara sederhana melalui media digital. Meskipun demikian, rendahnya partisipasi pelatihan digital dan lemahnya kesadaran keamanan data menunjukkan bahwa penguatan literasi digital tetap diperlukan agar pemanfaatan teknologi keuangan dapat dilakukan secara optimal, aman, dan berkelanjutan.

Pada bagian variabel inklusi keuangan diukur melalui sembilan indikator yang mencakup pencatatan keuangan, kepemilikan rekening/dompot digital, akses layanan keuangan formal, serta penerimaan bantuan sosial melalui rekening. Seluruh indikator menggunakan jawaban Ya/Tidak yang kemudian dikonversi ke skor numerik.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Item Inklusi Keuangan

No.	Indikator Inklusi Keuangan	Rata-rata	Standar Deviasi
1	Mencatat pemasukan dan pengeluaran harian	2,36	1,51
2	Mencatat transaksi jual-beli/pinjaman	2,75	1,49
3	Menggunakan aplikasi/kertas catatan keuangan	2,47	1,51
4	Mampu mengetahui keuntungan/kerugian usaha	3,13	1,38

5	Memiliki rekening bank atau dompet digital	3,84	0,69
6	Rutin transaksi non-tunai (QRIS/transfer/e-wallet)	3,45	1,17
7	Pernah mengajukan pinjaman/kredit formal	1,38	1,01
8	Mudah mengakses layanan keuangan	3,67	0,94
9	Menerima bansos melalui rekening/e-wallet	1,38	1,01
Skor Total Inklusi Keuangan		24,44	5,08

Tabel 3 memperlihatkan bahwa terdapat variasi yang cukup besar antarindikator inklusi keuangan, di mana kepemilikan rekening bank atau dompet digital menunjukkan rata-rata tertinggi, yaitu sebesar 3,84, kemudian diikuti oleh kemudahan akses terhadap layanan keuangan sebesar 3,67 dan rutinitas penggunaan transaksi non-tunai sebesar 3,45. Selain itu, sebagian responden juga telah melakukan pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan transaksi keuangan sederhana baik melalui media digital maupun pencatatan manual. Kondisi ini mendukung hipotesis P1 yang menyatakan bahwa penerapan akuntansi sederhana, partisipatif, dan non-teknis berdampak positif terhadap peningkatan transparansi dan pengambilan keputusan keuangan. Dengan adanya pencatatan keuangan yang sederhana, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui kondisi keuangan, mengontrol arus kas, serta memahami keuntungan maupun kerugian yang diperoleh. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi sederhana tidak hanya relevan bagi pelaku usaha besar, tetapi juga dapat diterapkan oleh masyarakat umum dan pelaku usaha mikro sebagai alat pengelolaan keuangan sehari-hari.

Tingginya tingkat penyebaran dan penggunaan layanan keuangan digital ini sejalan dengan kajian Sabrina et al. (2026) mengenai *cashless society*, yang mengonfirmasi bahwa Generasi Z dan kelompok mahasiswa memiliki tingkat akseptasi yang sangat tinggi terhadap sistem pembayaran digitas seperti QRIS dan *e-wallet*. Dikarenakan kelompok usia muda ini sangat mengutamakan aspek efisiensi, kecepatan, serta kemudahan penggunaan (*ease of use*) guna mendukung aktivitas harian mereka di lingkungan urban. Kepemilikan rekening bank, dompet digital, serta penggunaan transaksi non-tunai juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan telah berkembang cukup baik di kalangan responden. Hasil ini mendukung hipotesis P3 yang menyatakan bahwa inklusi keuangan berdampak positif terhadap perluasan akses keuangan formal. Dengan hadirnya layanan digital seperti QRIS, *mobile banking*, dan *e-wallet* dapat memudahkan serta membantu masyarakat melakukan transaksi secara cepat, praktis, dan efisien.

Meskipun demikian, hasil penelitian di Kecamatan Gunungpati menunjukkan bahwa inklusi keuangan digital baru optimal pada fungsi transaksi atau konsumsi harian dan belum menyentuh fungsi pembiayaan produktif. Kondisi tersebut tercermin dari rendahnya akses terhadap kredit formal yang hanya mencapai rata-rata 1,38. Rendahnya angka ini dipengaruhi oleh dominasi responden yang berstatus sebagai mahasiswa, sehingga sebagian besar belum memiliki penghasilan tetap yang menjadi salah satu persyaratan utama dalam pengajuan kredit formal. Secara teoritis, perbankan konvensional menetapkan regulasi ketat berbasis prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) seperti kewajiban memiliki slip gaji, agunan, atau rekam jejak pendapatan yang tetap. Akibatnya, karakteristik responden yang didominasi mahasiswa secara otomatis tereksklusi dari fasilitas pembiayaan modal formal tersebut. Oleh karena itu, perluasan inklusi keuangan di wilayah urban kampus memerlukan diversifikasi produk keuangan yang lebih inklusif dan fleksibel, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembayaran harian, tetapi juga mampu mendukung pembiayaan produktif masyarakat.

Responden juga diminta untuk menilai berdasarkan persepsi mereka terhadap peran literasi digital dalam mewujudkan inklusi keuangan menggunakan skala 1–4. Hasil menunjukkan rata-rata skor persepsi sebesar 3,25, dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 4. Distribusi Persepsi Peran Literasi Digital

Skor	Kategori	Jumlah (n)	Persentase (%)
1	Tidak Berperan	11	20
2	Kurang Berperan	1	1,8
3	Cukup Berperan	6	10,9
4	Sangat Berperan	37	67,3

Sebanyak 67,3% responden menyatakan bahwa literasi digital sangat berperan penting dalam mewujudkan inklusi keuangan, sebesar 10,9% responden menilai literasi digital cukup berperan dan 1,8% responden menilai kurang berperan. Namun, masih terdapat 20% responden yang menilai bahwa literasi digital tidak berperan terhadap inklusi keuangan. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya literasi digital dalam mendukung akses dan penggunaan layanan keuangan.

Pandangan optimis dari mayoritas responden tersebut didukung secara empiris oleh Rizal et al. (2025) yang menegaskan bahwa adopsi teknologi finansial (*fintech*) memiliki dampak positif yang signifikan dalam mendemokratisasi layanan keuangan. Kehadiran teknologi digital mampu menyediakan solusi alternatif bagi kelompok individu maupun pelaku usaha marginal yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem perbankan konvensional (*unbanked*). Melalui tingginya kesadaran dan kecakapan masyarakat, literasi digital dapat bertindak sebagai instrumen penting yang mendorong partisipasi ekonomi secara merata. Hal ini kemudian akan sejalan dengan upaya pemenuhan keadilan sosial, di mana seluruh lapisan masyarakat diberikan pengakuan ekonomi serta kesempatan yang setara untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya finansial mereka di era digital.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi sederhana, literasi digital, dan inklusi keuangan memiliki hubungan yang saling mendukung dalam mewujudkan keadilan sosial di era digital. Dengan menerapkan akuntansi sederhana melalui pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan transaksi keuangan, dapat membantu masyarakat untuk memahami kondisi finansial mereka secara lebih transparan dan terstruktur, sehingga mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih baik sebagaimana dijelaskan pada hipotesis P1. Kemudian, tingginya kemampuan responden dalam mengoperasikan *smartphone* dan menggunakan aplikasi keuangan digital menunjukkan bahwa literasi digital berperan penting dalam mendukung penerapan praktik akuntansi sederhana, sesuai dengan hipotesis P2. Kemampuan digital tersebut juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif menggunakan layanan keuangan formal seperti *mobile banking*, QRIS, dan dompet digital, sehingga akses terhadap layanan keuangan menjadi lebih mudah dan luas sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis P3. Keterkaitan antara akuntansi sederhana, literasi digital, dan inklusi keuangan tersebut pada akhirnya mendukung terciptanya keadilan sosial melalui pemerataan akses ekonomi, peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi digital, serta kesempatan yang lebih setara dalam mengelola sumber daya keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis P4 bahwa akses yang merata terhadap akuntansi sederhana, literasi digital, dan inklusi keuangan secara bersama-sama berdampak terhadap terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Menurut hasil analisis dan pembahasan mengenai peran pentingnya literasi digital sebagai alat inklusi keuangan diperoleh kesimpulan penting. Pertama, implementasi akuntansi

seederhana terbukti berdampak positif terhadap akuntabilitas dan dan kualitas pengambilan keputusan bagi UMKM. Pencatatan secara sederhana atau non-teknis dan peran aktif dari individu mampu menghilangkan bias informasi dengan memisahkan antara keuangan pribadi dengan modal usaha.

Kedua, tingkat literasi digital memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap implementasi praktik akuntansi sederhana di wilayah Kecamatan Gunungpati. Adanya akses, pengetahuan, dan penguasaan keamanan digital mampu menggerakkan masyarakat untuk beralih dari metode pencatatan manual ke sistem digital. Ketiga, inklusi keuangan membuktikan secara nyata keberhasilan dalam perluasan akses layanan perbankan bagi kelompok *unbanked* melalui pengetahuan tentang literasi keuangan yang kuat dan sistem yang mendukung.

Keempat, akses yang merata antara akuntansi sederhana, literasi digital, dan inklusi keuangan secara komprehensif berdampak positif terhadap perwujudan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok marginal. Mereka dapat memotong biaya transaksi yang mahal, melindungi aset fisik dari berbagai risiko, dan berpartisipasi aktif dalam perputaran ekonomi. Penelitian ini menegaskan bahwa inklusi keuangan secara digital bukan hanya tentang penyediaan teknologi, tetapi berkenaan dengan penegakan keadilan sosial. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan jumlah sampel yang lebih proporsional dengan jumlah populasi supaya hasil penelitian dapat lebih tajam dan valid.

REFERENSI

- Ainiyah, F., Yuliana, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Fintech dan Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(3), 1005–1018.
- Ali, J., & Faroji, R. (2021). Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Sosial; Tesponsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Neraca Peradaban*, 1(2), 128–135.
- Amika, F. Z., Sulistyowati, T., & Sulismaidi, S. (2024). Pendekatan Berkeadilan dalam Pembangunan Masyarakat: Studi Literatur Komprehensif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 7.
- Bank Indonesia. (2020). Keuangan Inklusif. Retrieved from <https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx>
- Fitri, N. (2024). *PENGARUH LITERASI KEUANGAN, LITERASI DIGITAL DAN FINANCIAL TECHNOLOGY TERHADAP INKLUSI KEUANGAN*. Universitas Jambi.
- Fraser, N. (2019). *The old is dying and the new cannot be born: From progressive neoliberalism to Trump and beyond*.
- Hemayanti, N., & Nurabiah. (2025). The Influence of Financial Literacy, Lifestyle and Fear of Missing Out on the Financial Behavior of Generation Z. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR)*, 4(1), 301–318. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/eajmr.v4i1.13276>
- Isabella, I., Iriyani, A., & Puji Lestari, D. (2023). Literasi Digital sebagai Upaya Membangun Karakter Masyarakat Digital. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8(3), 169–170.
- Joseph, J. K., Antony, J., & V, T. K. (2021). Financial Literacy: Role and Impact on Financial Inclusion. *UGC Care Journal*, 44(1), 2249– 6661.
- Junin, Y. (2024). Konsep Keadilan Sosial dalam Perspektif Nancy Fraser. Universitas Katolik Widya Mandira.

- Kurniawan, M. (2025). Akuntansi Partisipatif Dalam Pengelolaan Dana Desa. *JURNAL ECONOMINA*, 4(8), 300.
- Laut L. T. & Hutajulu, D. M. (2019). Kontribusi Financial Technology Dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Prosding Seminar Nasional Dan Call For Papers*, 326–336.
- Liska, R., Machpudin, A., Khaza, M. A. M. H., Ratnawati, R., & Wediawati, B. (2022). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan (Studi Empiris Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jambi). *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 11(4), 1034–1043.
- Mardiana, S. L., Faridatul, T., Herlindawati, D., Tiara, & Mardiyana, L. O. (2020). The contribution of financial technology in increasing society's financial inclusions in the industrial era 4.0. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 485(1), 1–7.
- Marginingsih, R. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 58.
- Rasenda, M. R., Wiyana, H., Saputra, A. I. (2025). Peran Fintech Dalam Inklusi Keuangan: Peluang Dan Tantangan Di Era. *Jurnal Bisnis Digital*, 1(1), 28.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025*. Retrieved from <https://ojk.go.id/id/Fungsi-Utama/Perilaku-Pelaku-USaha-JasaKeuangan/SNLIK/Pages/SNLIK-2025.aspx>
- Rais, L., Halik, W., Taopan, A., Rumodar, M., Yanyaan, R. R., & Saiba, R. L. (2025). Keadilan Sosial Dalam Pembangunan: Tinjauan Literatur Terhadap Kebijakan Pembangunan Dengan Adanya Efisiensi Anggaran Dari Pusat. *Papua Journal of Sociology*, 3(1), 42.
- Rani, G. M., & Desiyanti, R. (2024). Pengaruh Literasi Keuangan, Inklusi Keuangan dan Digital Payment Terhadap Kinerja UMKM Makanan & Minuman di Kota Padang. *EKOMABIS: Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis*, 5(02), 171.
- Rusydi A. Siroj, Win Afgani, Fatimah, Dian Septaria, G. Z. S. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 5.
- Sabrina Luthfia, Inayah Nurul, & Syahbudi Muhammad. (2026). *QRIS Dan Fenomena Cashless Society: Efisiensi Pembayaran Digital Terhadap Perspektif Gen Z*. 10, 510.
- Safii, M. A., & Nisa, F. L. (2024). Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan: Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan. *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(3), 512.
- Saputra, D. F. (2023). Literasi Digital untuk Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 17(3), 3.
- Sari, A. N., & Kautsar, A. (2020). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan, Financial Technology, dan Demografi terhadap Inklusi Keuangan pada Masyarakat di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 8(4), 1233.
- Surya Dwi Puspasari et al. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Terhadap Keputusan Pengambilan Kredit Petani Jagung Desa Jotang Pada Bri. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 2–3.
- Suryadi. (2023). *Peran Balai Diklat Keagamaan Dalam Gerakan Literasi Digital Masyarakat Melalui Pelatihan Media Penyuluhan*. 16(2), 155–156.

- Taufiq R. B. P. (2023). Analisis Tingkat Kesadaran Keamanan Informasi: Studi Kasus Pengguna Aplikasi Perbankan Digital Di Indonesia Guna Mencegah Social Engineering. *Jurnal Syntax Idea*, 5(1), 88–89.
- Yanti, A., & Nurhidayah, F. (2020). Pentingnya Pemahaman Akuntansi Sederhana Sebagai Solusi Untuk Menyusun Laporan Keuangan (Studi kasus pada UD Rian Arianto Farm). *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 189–190.
- Yoga, I., & Handayani, P. N. (2020). *Determinan Inklusi Keuangan Pada Masyarakat (Studi Pada Masyarakat Kabupaten Karanganyar)*. 2(2019), 1–11.
- Yuardi, I., Anggun, B., Lestari, H., & Nurabiah. (2023). The Effect of Financial Literacy , Financial Attitudes and Income Levels on the Financial Behavior of the People in Saribaye Village , Lingsar District , West Lombok Regency. *Proceedings of the 1st International Conference on Management and Small Medium Enterprise (ICMSME-2023)*, 1(March).